

Urgensi Pemilihan Pemimpin Beretika dalam Perspektif Maqashid Syariah Menuju Tatanan Sosial dan Politik yang Sehat

Arif Sugitanata

Fakultas Syaria'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 55281, Indonesia

Received: 2023-12-24

Revised: 2024-01-28

Accepted: 2024-02-04

Published: 2024-02-15

Abstract

This research explores the urgency of electing ethical leaders, where the challenges of globalisation and the complexity of contemporary problems make ethical leadership particularly relevant. Using the Maqashid Shariah theoretical framework, this study examines how ethical leaders can contribute to the benefit of the people through the protection of five critical aspects of life: religion, soul, mind, offspring, and property. Utilising desk research involving descriptive-analytical analysis of primary data sources such as books, journals, and relevant websites to comprehensively understand leadership ethics and its application in achieving sharia objectives. The results show that ethical leaders play a crucial role in building a healthy social and political order through fair and responsible policy-making, promoting justice and the common good, strengthening the foundations of democracy, and facing global challenges. In addition, ethical leaders are also crucial in promoting a culture of integrity and accountability, vital for crisis management and combating corruption. From a Maqashid Shariah perspective, the election of ethical leaders supports Islamic principles that favour the development of a just and prosperous society, confirming the relevance of electing ethical leaders not only in the broad political and social context but also within Islam's ethical and moral framework. This research invites stakeholders to adopt a leader selection paradigm that combines professional prowess with moral excellence, opening new insights into the importance of ethical criteria and integrity in leader selection for sustainable development.

Keywords

Ethics; Leader; Maqashid Sharia.

Corresponding Author

Arif Sugitanata

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Yogyakarta 55281, Indonesia; arifsugitanata@gmail.com

PENDAHULUAN

Pencalonan pemimpin yang tidak beretika menjadi isu yang penting dan sering kali menimbulkan perdebatan. Kasus-kasus ini menyoroti betapa pentingnya integritas, transparansi, dan tanggung jawab dalam kepemimpinan (Kemenko PMK, 2023). Isu ini bukan hanya tentang pencalonan individu dengan sejarah perilaku tidak etis, tetapi juga tentang bagaimana sistem politik dan hukum memungkinkan, atau bahkan dalam beberapa kasus, mendukung pencalonan mereka. Sering kali masyarakat disuguhkan dengan menyaksikan figur-figur politik yang muncul ke permukaan meski memiliki catatan negatif dalam hal etika dan moral. Mulai dari korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, hingga pelanggaran hak asasi manusia. Isu-isu ini tidak hanya merusak citra pemimpin tersebut tetapi juga menimbulkan keraguan serius terhadap sistem yang memungkinkan mereka untuk mencalonkan diri (Chairil

& Sugitanata, 2022). Kepemimpinan yang tidak etis dapat mengikis kepercayaan publik terhadap institusi dan menghambat kemajuan sosial dan ekonomi (Syanur, AW, & Afrilia, 2023).

Di sisi lain, masyarakat sipil dan media memainkan peran kritis dalam mengungkap dan menantang pencalonan pemimpin yang tidak beretika (Aliano & Adon, 2023). Investigasi jurnalistik, aktivisme sosial, dan kampanye kesadaran dapat membantu menerangi rekam jejak calon pemimpin dan mendorong pertanggungjawaban (Nikolaus Harbowo, 2023). Meskipun demikian, tantangan tetap ada, terutama dalam menghadapi upaya untuk membungkam suara-suara kritis melalui intimidasi atau undang-undang yang membatasi kebebasan berbicara (Ramadhan, 2022). Mengatasi isu pencalonan pemimpin yang tidak beretika memerlukan upaya bersama dari seluruh lapisan masyarakat.

Penelitian-penelitian terdahulu telah menjelaskan bagaimana pemimpin yang beretika telah memberi warna dalam setiap lini, seperti di Pakistan, di mana terdapat kriteria yang menjadi tolak ukur dari pemimpin yang beretika, seperti mengidealkan akuntabilitas, keadilan, kejujuran, dan keterbukaan (Hameed, Waqas, Fatima, & Anjum, 2023). Dukungan akan urgensi dari pemimpin yang beretika juga datang dari Jerman dan Amerika Serikat dengan menawarkan empat karakteristik yang harus dibangun, seperti, Integritas, Altruisme, Saling Memotivasi, dan Saling Mendukung (Martin, Resick, Keating, & Dickson, 2009). Melalui kepemimpinan yang beretika ini, pada tingkat perusahaan, karyawan merasa dihargai dan tingkat kesolidan dalam bekerja akan semakin meningkat (Páez & Salgado, 2016). Sehingga, Iwan Nugroho dalam penelitiannya menjelaskan bahwa penting bagi seorang pemimpin untuk membangun hubungan yang baik dengan semua pihak berdasarkan standar etika yang dianggap memiliki dampak positif (Nugroho, 2013).

Berbeda dengan penelitian sebelumnya. Penelitian ini mengusung semangat baru dalam mengamati karakteristik pemimpin dengan mengintegrasikan kerangka teori maqashid syariah yang menjadi bagian dari keunggulan dalam penelitian ini. Pemilihan teori ini membuka jendela penelitian pada dimensi spiritualitas dan moralitas yang seringkali terabaikan dalam penelitian sebelumnya. Dalam menggali urgensi memilih pemimpin beretika, penelitian ini meresapi aspek-aspek kunci dari maqashid syariah, yang melibatkan perlindungan terhadap lima nilai utama, yaitu hifzh al-din (perlindungan terhadap agama), hifzh al-nafs (perlindungan terhadap jiwa), hifzh al-'aql (perlindungan terhadap akal), hifzh al-nasl (perlindungan terhadap keturunan), dan hifzh al-mal (perlindungan terhadap harta) (Al-Imam Abu Ishaq Asy-Syatibi, 2003).

Dengan menggunakan kerangka teori ini, penelitian mendalam tentang etika pemimpin menjadi lebih holistik, mencakup komitmen mereka terhadap prinsip-prinsip moral dan spiritual yang ditemukan dalam maqashid syariah. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih kaya dan kontekstual mengenai bagaimana pemimpin yang beretika dapat memengaruhi organisasi atau masyarakat bahkan negara di tingkat yang lebih dalam dan berkelanjutan.

Penelitian ini tidak hanya sekadar memetakan karakteristik pemimpin beretika, tetapi juga membuka pintu untuk pembahasan lebih lanjut tentang bagaimana implementasi prinsip-prinsip maqashid syariah dalam kepemimpinan dapat meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan dampak positifnya pada keberlanjutan organisasi atau masyarakat. Dengan pendekatan ini, penelitian ini berkontribusi pada literatur kepemimpinan dengan merangkul dimensi spiritual dan moral yang esensial dalam mengevaluasi kualitas seorang pemimpin.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam mengenai pentingnya pemilihan pemimpin yang beretika, yang mana etika pemimpin memiliki dampak signifikan terhadap keberlangsungan dan kemajuan suatu organisasi, masyarakat, bahkan negara (Wuryan, Mustofa, Saputra, & Cahyani, 2023). Urgensi memilih pemimpin yang beretika menjadi sangat relevan di era globalisasi ini, di mana tantangan dan kompleksitas permasalahan semakin meningkat, membutuhkan kepemimpinan yang tidak hanya berbasis pada kemampuan teknis semata, tapi juga pada nilai-nilai etika dan moral. Dalam penelitian ini, teori maqashid syariah dipilih sebagai landasan analisis karena menawarkan perspektif yang kaya tentang etika kepemimpinan dalam kerangka pencapaian kemaslahatan umat. Maqashid syariah, yang berarti tujuan-tujuan syariah (Al-Imam Abu Ishaq Asy-Syatibi, 2003), memberikan panduan tentang bagaimana pemimpin harus bertindak untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia, melindungi kehidupan, akal, keturunan, agama, dan harta. Melalui lensa teori ini, penelitian ini berupaya mengeksplorasi bagaimana pemimpin yang beretika dapat berkontribusi terhadap pencapaian tujuan-tujuan tersebut dalam konteks kontemporer.

Penelitian ini menggunakan sumber data primer yang melibatkan buku-buku, jurnal-jurnal, dan website-website yang relevan dengan topik kepemimpinan, etika, dan maqashid syariah. Informasi yang diperoleh dari buku-buku mencakup teori-teori terkait, sedangkan jurnal-jurnal menyediakan data dari penelitian sebelumnya, temuan, dan analisis. Selain itu, situs web yang relevan juga memberikan wawasan mendalam. Sumber data sekunder dalam

penelitian ini mencakup referensi dari buku-buku, jurnal-jurnal, dan website-website yang dikutip oleh penulis. Analisis dan ringkasan dari sumber-sumber primer juga digunakan untuk mendukung klaim, argumen, atau temuan yang disajikan dalam penelitian. Dengan kombinasi sumber data primer dan sekunder, peneliti membangun landasan yang kokoh untuk menjelajahi dimensi kepemimpinan, etika, dan maqashid syariah dalam konteks studi ini. Selain itu, mengadopsi teknik analisis yang deskriptif-analitik, penelitian ini mengolah data tersebut untuk menghasilkan pemahaman yang komprehensif dan multidimensional tentang subjek yang dibahas (Fiantika et al., 2022). Sebagai bagian dari penelitian kualitatif, studi ini mengedepankan analisis mendalam dan interpretatif terhadap data yang dikumpulkan, memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi nuansa dan kompleksitas yang terkait dengan pemilihan pemimpin yang beretika. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan kontribusi teoretis ke dalam literatur akademik mengenai etika kepemimpinan dan maqashid syariah, tetapi juga memberikan rekomendasi praktis bagi praktisi, pembuat kebijakan, dan masyarakat luas dalam memilih dan mendukung pemimpin yang beretika.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam penelitian mengenai kepemimpinan yang berlandaskan etika, penelitian ini dimulai dengan mengidentifikasi dampak negatif yang timbul akibat pemilihan pemimpin yang tidak beretika, yang mana mencakup rentang masalah mulai dari ketidakadilan sosial hingga kerusakan moral dalam sebuah organisasi atau masyarakat hingga suatu negara. Selanjutnya, penelitian berfokus pada urgensi dan pentingnya memilih pemimpin yang beretika, di mana kepemimpinan semacam ini diharapkan dapat membawa kesejahteraan, keadilan, dan kemajuan yang berkelanjutan. Terakhir, penelitian ini menggali lebih dalam mengenai bagaimana implementasi Maqashid Syariah, yang merupakan prinsip-prinsip dasar dalam hukum Islam yang bertujuan untuk menjaga kesejahteraan umat manusia, dapat diterapkan dalam konteks pemilihan pemimpin beretika. Pendekatan ini menawarkan perspektif yang unik dalam memahami bagaimana nilai-nilai etika dan moral yang bersumber dari ajaran Islam dapat memberikan kontribusi positif dalam praktik kepemimpinan dan pengambilan keputusan.

Dampak Negatif Memilih Pemimpin Tidak Beretika

Memiliki pemimpin yang tidak beretika dapat menimbulkan sejumlah dampak negatif yang signifikan, baik dalam lingkup organisasi, komunitas, maupun pada skala yang lebih luas di masyarakat yakni bernegara (Basir, Noor, & Abd Rahman, 2016). Pemimpin yang tidak

memegang teguh prinsip etika seringkali memprioritaskan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu di atas kebaikan bersama, yang pada akhirnya bisa mengikis kepercayaan publik, merusak moral, dan menghambat kemajuan kolektif (Fikriana & Rezki, 2024). Ketika pemimpin bertindak tanpa mempertimbangkan etika, hal ini bisa menciptakan budaya kerja atau pemerintahan yang toksik, di mana praktik korupsi, nepotisme, dan penyalahgunaan kekuasaan menjadi hal yang biasa (Joseph Teguh Santoso, 2021). Lingkungan seperti ini tidak hanya merugikan secara material, tetapi juga menurunkan motivasi dan komitmen para anggotanya terhadap organisasi atau negara. Dalam jangka panjang, hal ini dapat menghambat inovasi dan efisiensi karena keputusan yang diambil lebih berdasarkan kepentingan pribadi daripada kualitas atau merit.

Selain itu, kehadiran pemimpin yang tidak etis dapat merusak reputasi organisasi atau negara di mata dunia. Ini bisa berdampak pada kehilangan kesempatan kerja sama internasional, investasi, atau dukungan dari komunitas global (Hassan, Kaur, Muchiri, Ogbonnaya, & Dhir, 2023). Dalam konteks pemerintahan, hal ini dapat menyebabkan isolasi politik atau sanksi ekonomi, yang pada akhirnya memperburuk kondisi kehidupan masyarakat (Benlahcene, Saoula, Jaganathan, Ramdani, & AlQershi, 2022). Pemimpin yang tidak beretika juga cenderung mengambil keputusan yang bersifat jangka pendek tanpa mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang dari tindakan mereka (Bauman, 2011). Ini dapat menimbulkan kerusakan lingkungan, ketidakstabilan ekonomi, atau ketidakadilan sosial yang serius, yang efeknya akan dirasakan oleh generasi mendatang. Kegagalan dalam mempertimbangkan keberlanjutan dan keadilan dapat mengarah pada kerusakan yang tak terperbaiki pada struktur sosial dan lingkungan kita. Oleh karena itu, penting bagi setiap negara untuk memilih pemimpin yang tidak hanya kompeten dalam bidangnya, tetapi juga memiliki integritas etika yang kuat (Azuka, 2009). Menanamkan etika dalam kepemimpinan tidak hanya tentang menghindari dampak negatif; itu juga tentang membuka pintu menuju masa depan yang lebih cerah dan adil bagi semua (Vakilbashi, Alhumaikani, Zamil, & Mokhber, 2017).

Lebih lanjut, Iwan Nugroho menjelaskan bahwa memiliki pemimpin yang tidak beretika dapat merugikan pada berbagai tingkatan, mulai dari lingkup internal organisasi hingga pada skala global dalam hubungan antarnegara. Pemimpin yang mengedepankan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu di atas kebaikan bersama seringkali menciptakan lingkungan kerja atau pemerintahan yang toksik, di mana korupsi, nepotisme, dan penyalahgunaan kekuasaan menjadi fenomena umum. Tindakan semacam ini tidak hanya merusak kepercayaan publik dan moral, tapi juga menghambat kemajuan kolektif dengan menurunkan motivasi dan

komitmen anggota terhadap organisasi atau negara. Akibatnya, inovasi dan efisiensi terhambat karena keputusan yang diambil lebih berorientasi pada kepentingan pribadi daripada kualitas atau merit, mengancam kemajuan jangka panjang dan kesejahteraan masyarakat.

Di sisi lain, dampak negatif dari kepemimpinan yang tidak etis juga meluas ke reputasi internasional, mempengaruhi peluang kerja sama dan investasi dari komunitas global (Martin, Resick, Keating, & Dickson, 2009). Pemimpin yang tidak mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang dari tindakan mereka dapat menyebabkan isolasi politik, sanksi ekonomi, kerusakan lingkungan, ketidakstabilan ekonomi, dan ketidakadilan sosial, dengan efek merugikan yang akan dirasakan oleh generasi mendatang. Kerusakan tersebut tidak hanya material tetapi juga berdampak pada struktur sosial dan lingkungan. Oleh karena itu, penting bagi negara untuk memilih pemimpin yang kompeten dan memiliki integritas etika yang tinggi, karena menanamkan etika dalam kepemimpinan esensial untuk membangun masa depan yang adil dan berkelanjutan bagi semua.

Urgensi Memilih Pemimpin Yang Beretika

Memilih pemimpin yang beretika merupakan salah satu pilar utama dalam membangun tatanan sosial dan politik yang sehat dan berkelanjutan (Kakabadse, Korac-Kakabadse, & Kouzmin, 2003). Pemimpin dengan etika yang baik tidak hanya menjadi contoh perilaku yang baik bagi masyarakat, tetapi juga menentukan arah dan kualitas kebijakan yang akan mempengaruhi kehidupan banyak orang (Gea, 2014). Dalam konteks ini, etika tidak hanya mencakup kejujuran dan integritas, tetapi juga keadilan, empati, dan komitmen terhadap kebaikan bersama (Wijaya, 2023). Pemimpin yang etis memastikan bahwa keputusan yang diambil berlandaskan pada nilai-nilai yang adil dan bertanggung jawab, bukan atas dasar kepentingan pribadi atau kelompok tertentu (Knights, 2022). Hal ini penting karena kebijakan yang dibuat oleh pemimpin memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. Kebijakan yang dibuat dengan panduan etika yang kuat cenderung lebih inklusif dan memperhatikan kebutuhan kelompok marginal, mencegah ketidakadilan sosial, dan memperkuat fondasi demokrasi (Singer, 2018).

Selain itu, pemimpin yang beretika juga berperan vital dalam membangun kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan (Mozumder, 2018). Dalam era informasi saat ini, kepercayaan publik mudah tererosi oleh skandal dan korupsi (Karimullah, Sugitanata, & Elmurtadho, 2023). Oleh karena itu, pemimpin dengan integritas tinggi menjadi kunci dalam menjaga legitimasi dan efektivitas lembaga-lembaga demokrasi (Langseth, Stapenhurst, &

Pope, 1997). Kepercayaan ini tidak hanya penting untuk stabilitas politik, tetapi juga untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses demokrasi. Di samping itu, urgensi memilih pemimpin etis juga berkaitan erat dengan kemampuan sebuah negara dalam menghadapi tantangan global. Di tengah tantangan seperti perubahan iklim, ketidaksetaraan global, dan konflik internasional, dibutuhkan pemimpin yang mampu menempatkan kepentingan bersama di atas segalanya (Ciulla & Ciulla, 2020). Pemimpin yang beretika akan lebih mungkin untuk bekerja sama secara internasional dan membuat keputusan yang tidak hanya menguntungkan negaranya sendiri tetapi juga berkontribusi pada kebaikan global (Choi, 2021).

Selain itu, pemimpin yang beretika memiliki peran penting dalam mempromosikan budaya integritas dan akuntabilitas di dalam pemerintahan dan lembaga-lembaga publik. Ketika pemimpin menunjukkan komitmen terhadap prinsip-prinsip etis, hal ini menciptakan standar perilaku yang diharapkan untuk diikuti oleh pejabat lain dan karyawan dalam organisasi. Ini mendorong lingkungan kerja di mana keputusan diambil dengan pertimbangan yang cermat terhadap konsekuensi etis, dan di mana ada mekanisme yang kuat untuk menangani pelanggaran (Leslie Lang Tsai & Jim Anderson, 2023). Dengan demikian, pemimpin etis berkontribusi pada pembangunan kapasitas institusional yang lebih besar untuk tata kelola yang baik, yang merupakan aspek kunci dari pembangunan berkelanjutan dan pemerintahan yang efektif.

Pemimpin dengan etika yang baik juga esensial dalam menghadapi krisis. Dalam situasi yang penuh tekanan atau krisis, pemimpin etis dapat menavigasi tantangan dengan cara yang mempertimbangkan dampak jangka panjang dari keputusan mereka, bukan hanya keuntungan jangka pendek atau popularitas. Kemampuan untuk tetap berpegang pada prinsip etis di saat-saat sulit ini menunjukkan kekuatan karakter dan kebijaksanaan, yang tidak hanya menginspirasi kepercayaan dan dukungan dari masyarakat tetapi juga memastikan bahwa tindakan yang diambil berkontribusi pada pemulihan dan kemajuan yang adil (Ali Awad & Al-anwer Ashour, 2022). Lebih jauh, keberadaan pemimpin yang beretika mendorong transparansi dan dialog terbuka dengan masyarakat. Pemimpin yang terbuka tentang kebijakan mereka, yang bersedia mendengarkan dan berinteraksi dengan berbagai pemangku kepentingan, memperkuat demokrasi dengan memastikan bahwa suara-suara dari berbagai segmen masyarakat didengar dan dipertimbangkan (Hulse III & Winston, 2023). Hal ini menciptakan rasa kepemilikan dan keterlibatan di antara masyarakat, yang vital untuk kohesi sosial dan kestabilan politik.

Terakhir, pemimpin etis berperan penting dalam memberantas korupsi, salah satu

penghalang terbesar terhadap pembangunan ekonomi dan sosial (Setiawan & Fauzi, 2019). Dengan menetapkan contoh perilaku yang tidak korup dan memastikan bahwa sistem pemberantasan korupsi berfungsi efektif, pemimpin dapat membangun fondasi yang lebih kuat untuk pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Ini tidak hanya meningkatkan efisiensi dan keadilan dalam penggunaan sumber daya publik tetapi juga memperkuat kepercayaan investor dan mendorong investasi asing, yang keduanya penting untuk pembangunan ekonomi. Dengan demikian, urgensi memilih pemimpin yang beretika tidak hanya berdampak pada aspek moral dan etis dalam pemerintahan, tetapi juga memiliki implikasi luas terhadap keberhasilan tata kelola, pembangunan ekonomi, dan kestabilan sosial-politik (Seijts & Milani, 2023). Memilih pemimpin yang beretika adalah investasi dalam masa depan yang lebih cerah dan lebih adil bagi semua.

Implementasi Maqashid Syariah dalam Pemilihan Pemimpin Beretika

Analisis melalui lensa teori Maqashid Syariah memungkinkan kita untuk memahami pentingnya pemilihan pemimpin yang beretika dalam menciptakan tatanan sosial dan politik yang sehat dan berkelanjutan dari perspektif Islam. Teori Maqashid Syariah, yang mengacu pada tujuan-tujuan hukum Islam, dirancang untuk melindungi dan memelihara lima aspek kunci kehidupan: agama (din), jiwa (nafs), akal ('aql), keturunan (nasl), dan harta (maal) (Al-Imam Abu Ishaq Asy-Syatibi, 2003). Dari perspektif ini, pemilihan pemimpin etis tidak hanya relevan dengan kehidupan politik dan sosial, tetapi juga merupakan komponen esensial dari kerangka etis dan moral Islam dalam membangun masyarakat yang adil dan makmur.

Pada konteks agama (din), pemimpin yang beretika mendukung kebebasan beragama dan mempromosikan nilai-nilai moral yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam (Hasanuddin, 2017). Pemimpin seperti ini menghargai keadilan, empati, dan kebaikan bersama, yang merupakan nilai-nilai inti dalam Islam, dan mengimplementasikannya dalam kebijakan-kebijakan publik, memastikan bahwa tatanan sosial dan politik mencerminkan nilai-nilai ini. Selain itu, mengenai perlindungan jiwa (nafs), pemimpin yang bertanggung jawab memastikan bahwa kebijakan yang dibuat melindungi kehidupan dan kesejahteraan masyarakat (Maak & Pless, 2006). Hal ini mencakup pencegahan ketidakadilan sosial dan pembuatan kebijakan yang inklusif, yang memperhatikan kebutuhan kelompok marginal. Ini sesuai dengan prinsip Islam yang menekankan pentingnya kesejahteraan dan keadilan sosial.

Lebih lanjut, dalam hal perlindungan akal ('aql), pemimpin etis mendukung pendidikan dan kebijakan yang memfasilitasi pemikiran kritis dan inovasi (Bezzina & Burford, 2010).

Dengan mempromosikan akuntabilitas dan integritas, serta melawan korupsi, mereka menciptakan lingkungan di mana akal bisa berkembang, sesuai dengan pandangan Islam tentang pentingnya pengetahuan dan pemikiran rasional. Kemudian, berkaitan dengan perlindungan keturunan (*nasl*), pemimpin etis memprioritaskan kebijakan yang mendukung kepentingan orang banyak, memastikan bahwa generasi mendatang dapat tumbuh dalam lingkungan yang sehat dan stabil (Eisenbeiss, 2012). Ini mencakup pemeliharaan nilai-nilai keluarga, pendidikan, dan kesejahteraan, yang semuanya dihargai dalam Islam. Di sisi yang lain, mengenai perlindungan harta (*maal*), pemimpin yang beretika memastikan penggunaan sumber daya yang adil dan efisien, menghindari pemborosan, dan mencegah korupsi (Naidoo, 2012). Hal ini menciptakan kondisi untuk pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, yang sesuai dengan pandangan Islam tentang pentingnya keadilan ekonomi dan kesejahteraan bersama.

Dalam konteks keadilan (*adl*), Islam menempatkan keadilan sebagai salah satu prinsip terpenting yang harus ditegakkan dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam pemerintahan dan kepemimpinan (Sugitanata, Karimullah, & Al Hamid, 2023). Pemimpin yang beretika, dari perspektif Islam, harus berusaha untuk mewujudkan keadilan sosial, ekonomi, dan politik (Solikhudin, 2017). Ini berarti membuat kebijakan yang tidak hanya adil secara formal tetapi juga substantif, mengakui dan mengatasi ketidaksetaraan, dan memastikan bahwa setiap individu memiliki akses yang sama terhadap sumber daya dan peluang. Hal ini sangat sesuai dengan tujuan *Maqashid Syariah* untuk melindungi kehidupan (*nafs*) dan harta (*maal*), memastikan bahwa kebijakan publik mendukung kesejahteraan umum dan menghindari eksploitasi atau penindasan.

Selanjutnya, pemimpin yang beretika memperhatikan kesehatan mental dan fisik masyarakatnya (Sveningsson & Blom, 2010), sesuai dengan tujuan *Maqashid* untuk melindungi jiwa (*nafs*). Dalam menghadapi krisis, seperti pandemi atau bencana alam, pemimpin harus mengambil keputusan yang tidak hanya mengatasi masalah segera tetapi juga mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap kesejahteraan fisik dan psikologis masyarakat (Asmawi & Fulazzaky, 2022). Ini mencakup memastikan akses ke layanan kesehatan, mendukung inisiatif kesehatan mental, dan membangun sistem dukungan sosial yang kuat. Dalam hal perlindungan akal (*'aql*), Islam menghargai pendidikan dan pengetahuan (Sugitanata & Zakariya, 2021). Pemimpin yang beretika harus mendorong pengembangan pendidikan dan penelitian, memastikan bahwa pendidikan tidak hanya tersedia tetapi juga berkualitas dan relevan dengan kebutuhan masyarakat (Dzuranin, Shortridge, & Smith, 2013).

Ini mencakup investasi dalam sains, teknologi, dan seni, serta memastikan bahwa pendidikan mempromosikan pemikiran kritis, inovasi, dan pemahaman lintas budaya. Pendidikan yang inklusif dan beragam ini mendukung pembangunan intelektual masyarakat dan mempersiapkan generasi mendatang untuk menghadapi tantangan global dengan solusi yang inovatif dan berkelanjutan (Handayani & Rahadian, 2013).

Terakhir, dalam konteks perlindungan harta (maal), Islam mendorong pengelolaan sumber daya yang bijaksana dan adil (Yanti, Sari, Handayani, & Sari, 2023). Pemimpin yang beretika harus menerapkan kebijakan ekonomi yang tidak hanya mengejar pertumbuhan tetapi juga keadilan dan keberlanjutan (Gani & Rahim, 2021). Ini termasuk mendukung ekonomi hijau, mempromosikan kesetaraan gender dalam lapangan kerja, dan memastikan bahwa kebijakan ekonomi mendukung usaha kecil dan menengah serta inisiatif lokal. Dengan demikian, ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif dapat diperkuat, menciptakan lapangan kerja, dan memperbaiki standar hidup sambil juga menjaga sumber daya alam untuk generasi mendatang. Melalui penerapan prinsip-prinsip Maqashid Syariah, pemimpin dapat membimbing masyarakat menuju keberlanjutan dan kesejahteraan yang lebih besar, menunjukkan bagaimana nilai-nilai Islam dapat diterjemahkan ke dalam praktek kepemimpinan yang etis dan efektif

KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa memilih pemimpin yang tidak beretika dapat memberikan dampak negatif yang signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan, mulai dari lingkup organisasi hingga tingkat nasional. Dampak tersebut melibatkan kerugian kepercayaan publik, merusak moral, dan menghambat kemajuan kolektif. Lingkungan kerja atau pemerintahan yang toksik juga dapat terbentuk, membuka peluang praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Selain itu, kehadiran pemimpin yang tidak etis dapat merusak reputasi suatu organisasi atau negara di mata dunia, berpotensi mengakibatkan isolasi politik atau sanksi ekonomi. Di sisi lain, penelitian juga menunjukkan urgensi memilih pemimpin yang beretika. Pemimpin dengan integritas etika yang kuat dapat menjadi pilar utama dalam membangun tatanan sosial dan politik yang sehat dan berkelanjutan. Pemimpin yang beretika tidak hanya menjadi contoh perilaku yang baik, tetapi juga berperan dalam menentukan arah kebijakan yang akan mempengaruhi banyak orang. Pemimpin beretika memastikan bahwa keputusan yang diambil didasarkan pada nilai-nilai yang adil dan bertanggung jawab, sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih inklusif, memperhatikan kebutuhan kelompok marginal, dan

memperkuat fondasi demokrasi.

Berdasarkan perspektif Maqashid Syariah, pemilihan pemimpin yang beretika juga merupakan bagian esensial dari kerangka etis dan moral Islam, yang bertujuan untuk melindungi dan memelihara lima aspek kunci kehidupan: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Pemimpin yang beretika mendukung kebebasan beragama, melindungi kehidupan dan kesejahteraan masyarakat, mendukung pendidikan dan pemikiran kritis, mempromosikan kesejahteraan keluarga, dan memastikan pengelolaan sumber daya yang adil dan efisien. Hal ini menunjukkan bahwa pemilihan pemimpin yang beretika tidak hanya relevan dalam konteks politik dan sosial secara luas, tetapi juga sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang mendukung pembangunan masyarakat yang adil dan makmur.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Awad, N. H., & Al-anwer Ashour, H. M. (2022). Crisis, ethical leadership and moral courage: Ethical climate during COVID-19. *Nursing Ethics*, 29(6), 1441–1456.
- Aliano, Y. A., & Adon, M. J. (2023). Percaturan Politik Geneologi Kekuasaan Dalam Sistem Pemilu '2024' Di Indonesia Perspektif Etika Michel Foucault. *Jurnal Filsafat Indonesia*, 6(3), 474–486.
- Al-Imam Abu Ishaq Asy-Syatibi. (2003). *Al-Muwafaqat fi Ushul as-Syari'ah* (II). Beirut: Dar al-kutub al-Islamiyyah.
- Asmawi, M. R., & Fulazzaky, M. A. (2022). Indonesian president's transformational leadership in the critical era. *Journal of Public Affairs*, 22, e2715.
- Azuka, E. (2009). Ethics of leadership and the integrity question among leaders. *IFE Psychologia: An International Journal*, 17(1), 11–26.
- Basir, S. A., Noor, N. S. M., & Abd Rahman, M. Z. (2016). Peranan Pemimpin dalam Pelaksanaan Etika Kerja Islam: Kajian Kes di Johor Corporation (Jcorp). *Jurnal Usuluddin*, 44, 45–84.
- Bauman, D. C. (2011). Evaluating ethical approaches to crisis leadership: Insights from unintentional harm research. *Journal of Business Ethics*, 98, 281–295.
- Benlhcene, A., Saoula, O., Jaganathan, M., Ramdani, A., & AlQershi, N. A. (2022). The dark side of leadership: How ineffective training and poor ethics education trigger unethical behavior? *Frontiers in Psychology*, 13, 1063735.
- Bezzina, M., & Burford, C. (2010). Leaders transforming learning and learners: An Australian innovation in leadership, learning and moral purpose. In *Global perspectives on educational leadership reform: The development and preparation of leaders of learning and learners of leadership* (pp. 265–283). Emerald Group Publishing Limited.
- Chairil, A., & Sugitanata, A. (2022). Maqashid Asy-Syari'ah Review on Former Corruption Convicts as Prospective Legislative Members. *Hunafa: Jurnal Studia Islamika*, 19(2), 299–323.
- Choi, F. K. (2021). How to select good leaders in Asian countries: The case of China and

- Singapore. *Public Administration and Policy*, 24(3), 264–274.
- Ciulla, J. B., & Ciulla, J. B. (2020). Ethics and effectiveness: The nature of good leadership. *The Search for Ethics in Leadership, Business, and Beyond*, 3–32.
- Dzurainin, A. C., Shortridge, R. T., & Smith, P. A. (2013). Building ethical leaders: A way to integrate and assess ethics education. *Journal of Business Ethics*, 115, 101–114.
- Eisenbeiss, S. A. (2012). Re-thinking ethical leadership: An interdisciplinary integrative approach. *The Leadership Quarterly*, 23(5), 791–808.
- Fiantika, F. R., Wasil, M., Jumiyati, S., Honesti, L., Wahyuni, S., Mouw, E., ... Ambarwati, K. (2022). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Get Press.
- Fikriana, A., & Rezki, M. K. (2024). Etika Politik Dan Kualifikasi Calon Legislatif Dalam Pemilu: Perspektif Fiqih Siyarah. *Aladalah: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, 2(1), 235–248.
- Gani, A., & Rahim, T. A. (2021). Etika Pembangunan dan Ekosistem Lingkungan Hidup. *Jurnal Assyifa' Ilmu Keperawatan Islami*, 6(2), 1–14.
- Gea, A. A. (2014). Integritas personal dan kepemimpinan etis. *Humaniora*, 5(2), 950–959.
- Hameed, A. A., Waqas, M., Fatima, T., & Anjum, Z. U. Z. (2023). Ideals Versus Actual Practice of Ethical Leadership: A Case Study Analysis of Public Sector Organizations in Pakistan. *Global Business Review*, 09721509221149605.
- Handayani, T., & Rahadian, A. S. (2013). Peraturan perundangan dan implementasi pendidikan inklusif. *Masyarakat Indonesia*, 39(1), 149701.
- Hasanuddin, I. (2017). Hak Atas Kebebasan Beragama/Berkeyakinan: Sebuah Upaya Pendasaran Filosofis. *Societas Dei: Jurnal Agama Dan Masyarakat*, 4(1), 94–94.
- Hassan, S., Kaur, P., Muchiri, M., Ogbonnaya, C., & Dhir, A. (2023). Unethical Leadership: Review, Synthesis and Directions for Future Research. *Journal of Business Ethics*, 183(2), 511–550.
- Hulse III, C. E., & Winston, B. E. (2023). Leader and Follower Development in a Diverse Community: The Role of Authenticity and Transparency. In *Biblical Organizational Spirituality, Volume 2: Qualitative Case Studies of Leaders and Organizations* (pp. 9–30). Springer.
- Joseph Teguh Santoso. (2021, November 21). Inilah Etika Seorang Pemimpin Supaya Bisa Etika Seorang Pemimpin. *Alumni Universitas Sains & Teknologi Komputer*. Retrieved from <https://alumni.stekom.ac.id/artikel/inilah-etika-seorang-pemimpin-supaya-bisa-etika-seorang-pemimpin>
- Kakabadse, A., Korac-Kakabadse, N., & Kouzmin, A. (2003). Ethics, values and behaviours: Comparison of three case studies examining the paucity of leadership in government. *Public Administration*, 81(3), 477–508.
- Karimullah, S. S., Sugitanata, A., & Elmurtadho, F. (2023). Juridical Analysis of Public Information Disclosure in Government Systems in the Digital Era. *Constitution Journal*, 2(2), 1–18.
- KEMENKO PMK. (2023, July 27). Etika dan Integritas Kepemimpinan Dalam Pemerintahan di Indonesia Perlu Ditingkatkan. *Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan*. Retrieved from <https://www.kemenkopmk.go.id/etika-dan->

integritas-kepemimpinan-dalam-pemerintahan-di-indonesia-perlu-ditingkatkan

- Knights, J. (2022). Ethical leadership: How to develop ethical leaders. In *Transpersonal Leadership in Action* (pp. 35–46). Routledge.
- Langseth, P., Stapenhurst, R., & Pope, J. (1997). The role of a national integrity system in fighting corruption. *Commonwealth Law Bulletin*, 23(1–2), 499–528.
- Leslie Lang Tsai & Jim Anderson. (2023, June 12). The role of ethical leadership in curbing corruption. *The World Bank Group*. Retrieved from <https://blogs.worldbank.org/governance/role-ethical-leadership-curbing-corruption>
- Maak, T., & Pless, N. M. (2006). Responsible leadership in a stakeholder society—a relational perspective. *Journal of Business Ethics*, 66, 99–115.
- Martin, G. S., Resick, C. J., Keating, M. A., & Dickson, M. W. (2009). Ethical leadership across cultures: A comparative analysis of German and US perspectives. *Business Ethics: A European Review*, 18(2), 127–144.
- Mozumder, N. (2018). A multilevel trust-based model of ethical public leadership. *Journal of Business Ethics*, 153, 167–184.
- Naidoo, G. (2012). The critical need for ethical leadership to curb corruption and promote good governance in the South African public sector. *Journal of Public Administration*, 47(3), 656–683.
- NIKOLAUS HARBOWO. (2023, September 15). Memilih Calon Pemimpin Didasarkan pada Rekam Jejak hingga Gagasan. *Kompas.Id*. Retrieved from <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2023/09/15/memilih-calon-pemimpin-didasarkan-pada-rekam-jejak-hingga-gagasan>
- Nugroho, I. (2013). Mengembangkan etika kepemimpinan: Fenomena pada jabatan publik. *Diskusi Bulanan Malang Corruption Watch (MCW)*. Universitas Widyagama Malang, 20.
- Páez, I., & Salgado, E. (2016). When deeds speak, words are nothing: A study of ethical leadership in Colombia. *Business Ethics: A European Review*, 25(4), 538–555.
- Ramadlan, M. F. S. (2022). *Politik media, media politik: Pers, rezim, dan kemunduran demokrasi*. Malang: Universitas Brawijaya Press.
- Seijts, G., & Milani, K. Y. (2023). The character imperative: Creating a more just, prosperous, and sustainable future. *Organizational Dynamics*, 101012.
- Setiawan, A., & Fauzi, E. A. (2019). Etika kepemimpinan politik dalam penyelenggaraan pemerintahan Indonesia. *Jurnal Pemerintahan Dan Kebijakan (JPK)*, 1(1), 1–12.
- Singer, M. (2018). Delegating away democracy: How good representation and policy successes can undermine democratic legitimacy. *Comparative Political Studies*, 51(13), 1754–1788.
- Solikhudin, M. (2017). Penerapan good governance Di Indonesia dalam tinjauan hukum Islam kontemporer. *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam*, 7(1), 163–187.
- Sugitanata, A., Karimullah, S. S., & Al Hamid, R. (2023). Hukum Positif dan Hukum Islam: Analisis Tata Cara Menemukan Hukum dalam Kacamata Hukum Positif dan Hukum Islam. *Juris: Jurnal Ilmiah Syariah*, 3(1), 1–22.
- Sugitanata, A., & Zakariya, M. (2021). Peralihan Peran Pasangan Terdidik Antara Suami dan Istri. *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 6(2), 239–247.

- Sveningsson, S., & Blom, M. (2010). Leaders as buddies: Leadership through making people feel good. In *Metaphors we Lead By* (pp. 104–125). Routledge.
- Syanur, A. D. M., AW, I. B. S., & Afrilia, L. (2023). Politik Dinasti Di Indonesia: Tinjauan Kritis Terhadap Penerapan Demokrasi Di Era Kepemimpinan Presiden Jokowi. *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora*, 1(3), 17–26.
- Vakilbashi, A., Alhumaikani, A. T., Zamil, N. A. M., & Mokhber, M. (2017). The impact of integrity on leadership effectiveness. *Advanced Science Letters*, 23(9), 9334–9336.
- Wijaya, S. (2023). Pengaruh Ethical Leadership dalam Menciptakan Work Engagement Karyawan. *Jurnal Bina Manajemen*, 12(1), 378–392.
- Wuryan, S., Mustofa, M. B., Saputra, R., & Cahyani, M. P. (2023). Pengaruh Gaya Komunikasi Kepemimpinan dalam Pengelolaan Organisasi: Tinjauan Analisis. *Komunikasia: Journal of Islamic Communication and Broadcasting*, 3(1), 1–23.
- Yanti, H., Sari, F., Handayani, P. M., & Sari, A. N. (2023). Peran Manajemen Islam dalam Membangun Organisasi yang Berkelanjutan dan Etis. *Religion: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya*, 1(5), 777–782.